

KOORDINASI PENERTIBAN PELABUHAN ILLEGAL DI KOTA SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Mhd.Mulyawan

Email : awansukses2@gmail.com

Pembimbing: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Administrasi Negara FISIP Unifersitas Riau
Kampus bina widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Meranti district has a current Marine transport and ports are quite dense Karenamerupakan archipelago and adjacent to the neighboring countries, namely Malaysia and Singapore, where trade flows both countries is also high. Particularly in the Strait long as the capital city has a harbor district in addition to the official in many aquatic activities from ship berthing activities, Decrease Passenger and unloading is done at the port of unauthorized or illegal. So that illegal goods into the Selatpanjang suspected due to a number of ports in the region to be a place of loading and unloading the goods illegally. During this activity illegal port was rarely manifest monitoring of related parties.

The problem in this research is; how to coordinate policing illegal port in the city district Selatpanjang Meranti?. What is inhibiting coordination of policing illegal port in Selatpanjang City Meranti district?

The method used in this research is qualitative research methods. Data collection techniques in research, interview, search documentation, observation. Source of data in this study are primary data and secondary data.

Based on the results of research conducted that guidance by the Department of Transportation, Communications and Informatics through empowerment conducted by the Department of Transportation, Communications and Informatics through awareness by holding seminars by inviting all district head, entrepreneurs sea transport, as the city of Selatpanjang Monitoring conducted by the Department of Transportation, Communications and Informatics in monitoring by involving municipal civil service police Unit directly against illegal port. Factors hindering the Department of Transportation, Communications and Informatics in fostering human resources are inadequate in fostering and monitoring, as the Department of Transportation, Communications and Information only have 14 people who served in fostering and supervision. Low

public awareness of government regulation on the importance of using the ports that have been authorized.

Keywords: Coordination, Control, Port Illegal

Indonesia merupakan Negara maritim yang artinya Negara kepulauan yang mana Indonesia memiliki ribuan pulau antara lain terdapat 4 pulau Besar yaitu, Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Irian jaya. Sebagai negara kepulauan maka aktivitas perdagangan Indonesia menggunakan jalur laut lebih tinggi disamping jalur udara maupun darat dan posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan memberikan pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk kesuatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau bahkan antar Negara (Triatmojo, 2009:3). Setiap kapal yang masuk ke pelabuhan seharusnya melapor pada Petugas pelabuhan, membayar

retribusi barang, sandar kapal, serta pajak barang ekspor yang seharusnya di setor ke kas daerah. Sehingga dari kegiatan perdangan melalui pelabuhan ini akan tercipta pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, penerimaan pajak untuk daerah dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk pelabuhan maupun fasilitas umum lainnya.

Kegiatan aktivitas melalui pelabuhan ini juga dapat menghasilkan dampak negatif yaitu masuknya barang secara illegal apabila kurangnya pengawasan dari pihak bea dan cukai, pihak Syahbandar dan Dinas Perhubungan, sehingga ini dapat merugikan Negara terlebih lagi jika penyelundupan minuman Keras dan Narkotika yang sudah tentu dilarang oleh pemerintah.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kabupaten Termuda Di Provinsi Riau Karena telah mengalami pemekaran pada tahun 2009. Pada Kabupaten Kepulauan Meranti ini yang merupakan Kabupaten yang terdiri dari 9 Pulau dan memiliki 6 pelabuhan Resmi yaitu Pelabuhan barang Pelindo, pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang, pelabuhan Camat, pelabuhan Melibur, pelabuhan Tanjung Kedabu dan pelabuhan Tanjung Samak yang mana aktivitas antar pulau melalui Pelabuhan dapat digolongkan padat.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki arus transportasi Laut dan pelabuhan yang cukup padat Karena merupakan wilayah kepulauan dan

berdekatan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang mana Arus perdangan kedua Negara ini juga tinggi. Khususnya di Selat panjang sebagai ibu Kota Kabupaten di samping memiliki pelabuhan resmi dalam kegiatan perairan banyak dari aktivitas penyandaran Kapal, Penurunan Penumpang dan pembongkaran barang di lakukan pada pelabuhan yang tidak resmi atau illegal.

Banyaknya pelabuhan tidak resmi atau illegal tidak memiliki Izin di Kota Selatpanjang. Sehingga penelitian tertarik mengetahui penertiban pelabuhan ilegal, maka judul ini adalah; “Koordinasi Penertiban Pelabuhan Illegal di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana koordinasi penertiban pelabuhan illegal di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Apa penghambat koordinasi penertiban pelabuhan illegal di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti ?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui koordinasi penertiban pelabuhan illegal di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui penghambat koordinasi penertiban pelabuhan illegal di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Teoritis
 1. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu, yakni Ilmu Pemerintahan, khususnya ilmu dibidang penertiban pelabuhan illegal oleh Dinas Perhubungan.
 2. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.
- b. Praktis/aspek guna laksana

Bagi pihak terkait seperti: Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat setempat bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan secara holistik

yang lebih baik di masa yang akan datang.

Konsep Teori

1. Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang mana dalam mengolah sumber daya organisasi yang terdiri dari 6 M (*Man, Money, Method, Machine, Material Dan Market*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Koordinasi Salah satu cara mencapai tujuan Organisasi yaitu dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut yang salah satunya fungsi Koordinasi. Dengan adanya fungsi ini maka diharapkan tidak adanya tumpang tindih dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Terry (dalam Handyaningrat, 2002: 55) mengatakan koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan

Kemudian Sutarto (2002: 152) Dalam melakukan koordinasi itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara-cara diantaranya yaitu:

1. Mengadakan pertemuan informal antara para pejabat
2. Mengadakan pertemuan formal antara para pejabat yang biasa disebut rapat.
3. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
4. Membuat buku pedoman, buku pedoman tata

kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan.

Tujuan koordinasi menurut Hasibuan (2006: 87) adalah:

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikirannya kearah tercapainya sasaran organisasi.
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialisasi kearah tujuan organisasi .
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tinggi pekerjaan.
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tujuan dan sasaran
5. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur-unsur manajemen kearah sasaran organisasi.

Selanjutnya syarat mengadakan koordinasi yang baik adalah:

- a. Adanya perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan sistematis dari pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan
- b. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.
- c. Adanya pembagian tugas dan hubungan kerja antar kelompok dalam bentuk kerjasama
- d. Adanya pengawasan terhadap unit-unit pelaksanaan tugas dan hubungan kerja (Koontz dan O'Donnel, 1996: 42).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Dalam hal ini metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi. Deskriptif kualitatif juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi atau Pengamatan
Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada.
- b. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth* interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan.

- c. Dokumentasi
Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Penertiban Pelabuhan Illegal di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

Koordinasi itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara-cara diantaranya yaitu:

1. Koordinasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi melaksanakan kewenangan desentralisasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam

bidang perhubungan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai regulator terkait pelayanan publik khususnya menyelenggarakan layanan dalam bidang transportasi. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang perhubungan khususnya transportasi Laut di Kabupaten Kepulauan Meranti umumnya dan Kota Selatpanjang khususnya. Dengan demikian Dinas Perhubungan memiliki kewenangan mengatur dan mengambil kebijakan tentang permasalahan angkutan Laut di Kota Selatpanjang.

2. Instansi yang Terlibat Koordinasi

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika melakukan koordinasi dengan beberapa instansi sebagai berikut;

1. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
2. Bea Cukai
3. Pol Air
4. Syah Bandar

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika melalui;

a. Sosialisasi

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika melakukan sosialisasi dengan mengundang para pengusaha dan juga pemilik biro perjalanan laut yang ada di Kota Selatpanjang untuk memberikan pandangan mengenai perlunya penertiban terhadap pelabuhan-pelabuhan illegal yang ada di sepanjang Kota Selatpanjang;

B. Penghambat Koordinasi Penertiban Pelabuhan Illegal di Kota

Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

Faktor penghambat koordinasi penertiban pelabuhan illegal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika adalah sebagai berikut;

1. Sumber daya manusia

Berdasarkan data yang diperoleh yang menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi, dan pengaturan terhadap pelabuhan illegal di Kota Selatpanjang yang saat ini sedang marak-maraknya sebagaimana pada tabel berikut ini;

Faktor penghambat dalam melakukan pembinaan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika tidak memadainya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelabuhan illegal yang ada di Kota Selatpanjang, dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan perkebangan yang pesat serta banyaknya pelabuhan illegal dibandingkan dengan petugas yang melakukan pengawasan dan pembinaan jelas tidak memadai, dengan luas Kabupaten Kepulauan Meranti Oleh karena itu faktor penghambat utama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelabuhan illegal.

2. Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat pelaksanaan koordinasi merupakan sarana dan prasarana dari masing-masing lembaga serta kesadaran para pengusaha transportasi dan masyarakat Kota Selatpanjang pentingnya penertiban pelabuhan illegal yang ada di Kota Selatpanjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fandi Tjiptono, 1997, *Strategi Pemasaran*, Edisi ketiga, Yogyakarta: Andi Offset
- Gaspersz, V, 1997, *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Salemba Empat
- Harbani, Pasolong, 2013, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV. Alfabeta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara: Jakarta
- Jhon Salindeho, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika: Jakarta,
- Maleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Moenir, A. S, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sampara Lukman, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA LAN Press
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press: Jakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sinambela, L. P, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara